

Wajah Bangsa dan Politik Elitis Kita

Oleh ALEX SOBUR

Dan sedjarah akan menulis: di sana, di antara benua Asia dan benua Australia, antara Lautan Teduh dan Lautan Indonesia, adalah hidup satu bangsa jang mula-mula mentjoba untuk hidup kembali sebagai Bangsa, akhirnya kembali mendjadi satu kuli di antara bangsa-bangsa—kembali mendjadi een natie van koelies, en een koelie onder de naties.

Sukarno, "Tahun Vivere Pericoloso," 17 Agustus 1964

Konon, wajah suatu bangsa bisa dilihat dari sejarahnya. Manakala sejarah cuma dicatat berdasarkan sepeinggal peristiwa dan menganalisisnya dengan asumsi, betapa bopengnya wajah bangsa itu. Begitu pula ketika data dan fakta, yang merupakan fondasi sejarah, telah dirasuki kepentingan-kepentingan politik sepihak, lantas dibahasakan secara sangat berlainan dengan peristiwa sesungguhnya, tidak ada lagi yang tersisa selain wajah bangsa yang bopeng tadi.

Sejarah Indonesia modern pasca-Proklamasi 1945 adalah sejarah yang sarat warna kontras antara kekuatan persatuan dan kekuatan perpecahan. Sukarno-Hatta sebagai simbol perjuangan terhadap kolonialisme dan simbol perjuangan bangsa otomatis dipilih menjadi pemimpin puncak negara. Meski keduanya berbeda visi ihwal bentuk negara--kesatuan atau federasi--atribut dwitunggal yang dipasangkan kepada mereka kemudian seakan telah meleburkan segala perbedaan itu, sekalipun belakangan keduanya berpisah lagi.

Kekuatan magnet dwitunggal selama Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) dan beberapa tahun sesudah itu, sebagaimana pernah dilukiskan Ahmad Syafi'i Ma'arif (2003), demikian hebatnya. Namun, bibit-bibit konflik, vertikal dan horizontal, selama periode kritikal itu dan periode berikutnya tetap saja muncul.

Babak berikutnya, selama periode Orde Baru, kecuali di Aceh, hampir-hampir tidak terdengar konflik yang membawa banyak korban. Sistem politik otoritarian pada masa itu berhasil meredam hampir semua gejolak sosial dan politik, dan relatif telah menciptakan suasana aman, sekalipun sebenarnya semu. Dengan runtuhnya rezim Orde Baru pada 1998, muncullah apa yang disebut era reformasi, yang sudah berjalan selama hampir sebelas tahun hingga sekarang.

Era reformasi jelas belum mengantar kita pada bangkitnya rezim yang kita dambakan. Hingga kini, kita sebagai bangsa masih dipaksa menghadapi rubungan pilihan simalakama, meniti dilema dan kekecewaan yang satu ke dilema dan kekecewaan yang lain. Agaknya, sulit bagi kita mengelakkan pertanyaan: inikah yang dulu disebut Bung Karno sebagai pyrrhus-overwinning, kemenangan palsu, kemenangan sesaat, yang tak lain adalah awal dari "keruntuhan total"? Bisakah kita mengkritik revolusi Indonesia, yaitu bahwa reformasi ini adalah—meminjam ungkapan Mochtar Pabottingi (2000)—een reformatie op drift, suatu reformasi kleyar-kleyor, suatu reformasi tanpa arah?

Harus diakui, sulit untuk menampik bahwa tuntutan reformasi total yang diperjuangkan mahasiswa telah terdepak ke pinggir lapangan dan mungkin segera menjadi—meminjam kata-kata Munafrizal Manan (2005)— "monumen heroisme" belaka. Ungkapan kekecewaan dan suara keras tidak puas dari banyak mahasiswa yang muncul sejak naiknya Habibie hingga sayup terdengar pada periode Megawati, sebetulnya menyuguhkan konfirmasi bahwa cita-cita reformasi total masih belum terwujud. Sementara itu, dengan segenap kondisi objektif yang merisaukan dan mengesalkan pada era transisi kini, beredar spekulasi bahwa prospek demokrasi terkonsolidasi tidak begitu menjanjikan.

Agaknya, Indonesia dalam era transisi sekarang, persis seperti ungkapan Benedict Anderson (1983) yang pernah ia gunakan untuk menjelaskan politik Indonesia di bawah Orde Baru, yaitu "Old State and New Society". Lihat saja, sejak era transisi dimulai, komposisi aktor-aktor negara memang telah berganti, namun substansi karakternya masih belum banyak berubah dari periode-periode kekuasaan sejak Indonesia merdeka. Masyarakatnya adalah sosok yang baru karena dinamika pesatnya, akan tetapi negara tetap saja menampilkan sosoknya yang elitis. Politik Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini menunjukkan hakikat politik yang elitis itu.

Munculnya politik yang elitis ditandai dominasi elite politik dalam panggung politik Indonesia dan tersisihnya kekuatan populis (terutama mahasiswa) yang dulu menjadi garda terdepan mendobrak penjara politik rezim Orde Baru yang otoritarian. Sejak tergusurnya rezim Orde Baru, pergeseran ini telah dimulai dan ternyata masih bertahan hingga kini.

Jika pada awal perjuangannya kekuatan populis gigih mengusung semangat antiotoritarian, tetapi di ujung perjuangannya, tanpa disadari, mereka justru membuka pintu untuk tampilnya kekuasaan elitis yang baru. Posisi mereka dengan mudah direbut para elite politik. Elite politiklah yang menikmati dengan santai hasil perjuangan kekuatan populis. Sementara, kekuatan populis menjadi terasing sebagai ujung tombak gerakan reformasi.

Apa pun wujud kekuatan politik yang kini muncul, akan menjadi kontraproduktif apabila kita kemudian melupakan persoalan sangat mendasar, yakni menemukan kembali dan membangun jati diri bangsa. Menyemai jati diri adalah langkah yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan hari depan bangsa. Salah satu langkah pertama dan utama adalah membersihkan diri dari segala "kotoran" yang melekat pada diri kita.***

Penulis, dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Fikom Unisba), Ketua III Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) Cabang Bandung.

Sumber:

Pikiran Rakyat, Kamis, 18 Juni 2009

<http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=81669>